

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan, belanja hibah berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah daerah di Pulau Jawa memiliki belanja hibah yang tinggi, jumlah temuan kelemahan SPI-nya justru rendah. Hal ini dapat terjadi karena langkah pemerintah yang telah berupaya memperkuat peraturan terkait tata kelola belanja hibah, salah satunya yaitu dengan memperbarui regulasi melalui Permendagri No. 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Selanjutnya, belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kelemahan SPI, yang berarti tinggi atau rendahnya belanja bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah daerah di Pulau Jawa tidak menyebabkan tinggi atau rendahnya temuan kelemahan SPI. Hal ini dikarenakan belanja bantuan sosial menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena banyaknya aduan atas ketidaksesuaian penerima bantuan sosial. Maka dari itu, berdasarkan saran dari BPK serta lembaga lainnya, Menteri Sosial bersama dengan pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan besar-besaran termasuk dalam hal sistem pengendalian internal.

Adapun, belanja modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI, yaitu meskipun pemerintah daerah di Pulau Jawa memiliki belanja modal yang tinggi tidak menyebabkan kelemahan SPI semakin tinggi juga, justru jumlah temuan kelemahan SPI-nya rendah. berdasarkan hasil EPPD pada pemerintah daerah di Pulau Jawa, disebutkan bahwa 94,69% pemerintah daerah telah mendapatkan status tinggi dan sedang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah di Pulau Jawa telah memiliki kinerja yang baik termasuk dalam pengelolaan belanja-belanjanya.

Implikasi pada penelitian ini, yaitu pemerintah daerah di Pulau Jawa dianggap telah mampu dalam mengelola belanja diskresioner maupun belanja modalnya terlepas dari lamanya pemerintah daerah tersebut telah berdiri. Dengan demikian, pemerintah sebagai regulator dapat meningkatkan belanja diskresioner dan belanja modal mereka, karena hal ini tidak menyebabkan pemerintah memiliki kelemahan SPI yang lebih tinggi. Adapun, belanja yang berkaitan dengan hibah,

bantuan sosial, dan belanja modal adalah belanja yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Maka dari itu, belanja dengan jumlah yang tinggi dan didukung oleh pemerintah daerah yang telah mampu mengelola belanja tersebut, maka akan semakin baik bagi kesejahteraan masyarakat.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis masih adanya keterbatasan serta terdapat kendala selama penulisan, diantaranya yaitu:

- a) Penelitian hanya meneliti variabel yang berkaitan dengan belanja, dimana menurut data temuan kelemahan SPI juga banyak ditemukan kelemahan yang berkaitan dengan penatausahaan aset tetap dan pengelolaan kas yang belum memadai, serta berkaitan dengan pendapatan.
- b) Penelitian ini hanya meneliti objek pemerintah daerah di Pulau Jawa, jika dibandingkan daerah lain Pulau Jawa cenderung lebih maju, sehingga seharusnya SPI nya juga relatif lebih mapan dari daerah lain, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.
- c) Pengumpulan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus dilakukan secara manual satu-persatu setiap daerah di *website* PPID dan tidak bisa melakukan *bulk request*, sehingga hal ini memakan waktu cukup lama.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini hanya menguji terkait dengan belanja, sehingga penelitian selanjutnya dapat meneliti terkait temuan kelemahan SPI lain yang juga masing sering ditemukan, seperti penatausahaan aset tetap dan pengelolaan kas yang belum memadai. Selain itu penelitian juga dapat dilakukan dengan objek yang berbeda, seperti kelemahan sistem pengendalian internal pada pemerintah provinsi ataupun BUMN.

- b) Saran Praktis

1) Bagi Peneliti Terdahulu

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat meneliti bagaimana pengaruh variabel yang berkaitan dengan penatausahaan aset tetap dan pengelolaan kas dengan kelemahan pengendalian internal. Peneliti juga dapat memperluas lingkup penelitiannya tidak hanya di Pulau Jawa.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat mempertahankan serta memperkuat sistem pengendalian internalnya, terutama dalam penyaluran belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal agar tepat sasaran. Selain itu, pemerintah dapat memperketat SOP dan meningkatkan prosedur validasi serta verifikasi agar tidak terjadi kesalahan penerima manfaat belanja yang dialokasikan.